

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini semakin pesat. Salah satu jenis usaha yang kini sedang berkembang di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa dan memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia karena dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan dan terus menerus. UMKM diharapkan dapat menguasai pangsa pasar nasional maupun pasar internasional, dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas dan terpercaya agar mampu memajukan dan menambah perekonomian negara serta juga dapat mengurangi tingkat pengangguran saat ini.

Seperti entitas bisnis pada umumnya UMKM juga perlu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. UMKM perlu menyusun laporan keuangan karena laporan tersebut berisi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha UMKM. Namun, pada umumnya keuangan tidak penting dan tidak perlu, serta membutuhkan waktu, kecermatan, dan biaya. Selain itu, seringkali para pelaku UMKM kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi kepada operasional usahanya. Kesulitan ini menyangkut atas bagaimana penelitian dan hasil yang dicapai oleh setiap usaha yang dijalankan (Sonny, 2010). Kebanyakan para pelaku UMKM hanya menghitung berapa besar harta yang dimiliki dan berapa besar uang kas yang dipegang saja, mereka tidak mengetahui bahwa pengertian harta lebih dari atau lebih luas dari sekedar uang kas (Anak Suryo, 2006).

Oleh karena itu pada umumnya pencatatan laporan keuangan UMKM hanya dicatat berdasarkan kas keluar dan kas masuk saja tanpa mencatat aktifitas ekonomi yang lainnya. Dengan hanya mencatat kas keluar dan kas masuk, maka pemilik UMKM sudah dapat mengetahui berapa jumlah pendapatan dan jumlah pengeluaran yang digunakan selama operasional perusahaan. Pemilik UMKM sudah merasa cukup dengan informasi ini, sehingga para pelaku UMKM enggan atau tidak mau untuk melakukan aktivitas pencatatan atau penyusunan laporan keuangan. Para pelaku UMKM hanya mengandalkan ingatan untuk mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan operasional usahanya.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa, ada beberapa kriteria yang tepat untuk UMKM sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 2. Kriteria Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- 3. Kriteria Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Dalam mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan standar akuntansi khusus yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif sejak 01 Januari 2018. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana dan mudah bila dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM ditunjukkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP. Dengan diterbitkannya SAK EMKM diharapkan para pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, sehingga EMKM dapat menyediakan informasi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang bermanfaat dan digunakan sejumlah para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Terdapat penelitian terdahulu terkait penerapan SAK ETAP dan SAK EMKM pada UMKM. Nanang (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan SAK EMKM di Surabaya, menyatakan bahwa mitra UMKM belum memiliki pembukuan yang terstruktur dan terkodifikasi dalam laporan keuangan yang baik sesuai standar EMKM. Laries, dkk (2013), dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Studi Kasus Cv. Citra Pandion Bernas, menyatakan bahwa telah menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, namun belum sepenuhnya menerapkan dan masih banyak unsur yang belum terpenuhi dan sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku yaitu

pendapatan tidak dipisahkan berdasarkan antara pendapatan operasional dan penghasilan. Lebih lanjut, Tatik (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Studi Kasus pada UD. Dua Putri Sholeha Probolinggo, menyatakan bahwa laporan keuangan yang di UD. Dua Putri Sholeha Probolinggo belum disusun sesuai dengan SAK EMKM. Laporan keuangan terbatas pada penyusunan laporan keuangan tertabatas atas transaksi-transaksi yang ada dalam entitas.

Seperti penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini juga akan membahas penerapan SAK EMKM pada salah satu UMKM yaitu UD. Karya Tangi Banyuwangi yang bergerak dalam bidang manufaktur (Pembuatan Tas dan Souvenir) yang terletak di Dusun Kampung Karya, Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Pada awal berdirinya tahun 2012, UD. Karya TAngi Banyuwangi ini hanya focus pada produksi dan tidak melakukan pemasaran sendiri. Namun seiring dengan perkembangan bisnisnya, UD. Karya Tangi Banyuwangi juga melakukan pemasaran sendiri mulai akhir tahun 2013. Meskipun telah berdiri sejak tahun 2012, UD. Karya Tangi Banyuwangi ini belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku karena keterbatasan sumber daya manusia yang memahami penyusunan laporan keuangan. UD. Karya Tangi Banyuwangi hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas saja sehingga tidak dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai. Hal ini mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan tidak terkontrol secara baik. Oleh karena itu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SAK EMKM SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM (Studi Kasus UD. Karya Tangi Banyuwangi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti di atas maka dalam penelitian ini di UD. Karya Tangi Banyuwangi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyusunan laporan keuangan UD. Karya Tangi Banyuwangi sebelum diterapkan SAK EMKM ?
- b. Bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada UD. Karya Tangi banyuwangi sesuai dengan SAK EMKM ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis oleh peneliti di atas, maka peneliti dapat menarik tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyusunann laporan keuangan UD. Karya Tangi Banyuwangi sebelum diterapkan SAK EMKM.

- b. Untuk Mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sebagai dasar pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UD. Karya Tangi.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian adalah :

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang standar penyusunan setiap pelaporan keuangan yang terdapat di entitas terutama tentang semua kegiatan operasional yang ada di UMKM dan upayanya dalam menerapkan SAK EMKM sebagai dasar menyusun laporan keuangan pada UD. Karya tangi banyuwangi.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti diharapkan dapat menjadi referensi dasar yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dengan objek dan kajian yang lebih mendalam tentang penerapan laporan keuangan mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- c. Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk UMKM sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan operasional perusahaannya agar semua kegiatan yang dilakukan dapat terkontrol dengan baik.

